



■ DPRD Akan Telusuri Penyebab

PONTIANAK, TRIBUN - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak 2020 berada pada neraca defisit. Hal ini akibat adanya belanja yang lebih tinggi akibat Pandemi Covid-19. Namun, kekurangan anggaran ini akan ditutupi dengan adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang terjadi pada Tahun Anggaran 2019.

"Masih terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) sebesar Rp 185,92 miliar pada APBD Kota Pontianak 2019," kata Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono saat Rapat Paripurna Pembahasan Rancangan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak 2019 di Kantor DPRD Kota Pontianak, Jl Sulran Syarif Abdurrahman, Jumat (17/7) siang.

"Silpa Rp 185 miliar ini akan dibelanjakan di perubahan anggaran. Kita kebetulan defisit di 2020 akibat Covid-19. Tentu sangat terbantu dengan adanya Silpa. Pembangunan defisit tidak sebesar Silpa. Sedangkan anggaran untuk 2020 masih akan dilakukan pembahasan lebih lanjut," katanya.

Edi menjelaskan bahwa anggaran itu digunakan untuk keperluan masyarakat di Kota Pontianak, baik di bidang pendidikan, infrastruktur, bencana alam, serta lainnya.

"Rancangan pertanggungjawaban APBD 2019 ini intinya ada beberapa catatan yang ditekankan oleh DPRD, peningkatan kualitas pelayanan kita secara umum diterima," jelasnya. Penanganan banjir, terus peningkatkan jalan lingkungan, sekolah dan infrastruktur



Peningkatan kualitas pelayanan kita secara umum diterima.

Edi Rusdi Kamtono
Wali Kota Pontianak

lainnya," tambahnya.

Edi R Kamtono menjelaskan sisa lebih penggunaan anggaran pada APBD 2019 sebesar Rp 185,92 miliar tersebut merupakan sisa dari penghematan anggaran dan beberapa lagi dari kegiatan yang tidak dilaksanakan karena tenggat waktu yang sudah lewat.

"Secara keseluruhan berjalan baik. Serapan anggarannya juga di atas 90 persen," ungkap Edi

Meski serapan anggaran baik dan BPK menetapkan Pemkot Pontianak mendapat penilaian wajar tanpa pengecualian, ada beberapa kinerja yang harus dievaluasi. Seperti kegiatan yang menggunakan DAK, tidak dapat dilaksanakan pada 2019 akibat tenggat waktu yang sudah lewat. Ada juga alokasi anggaran yang tidak digunakan buat menghemat anggaran, dan anggaran sisa lelang.

Telusuri

Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin memandang, sisa Rp185,92 miliar ini akan ditelusuri. "Kami akan mencari penyebabnya. Kenapa sampai terjadi Silpa dan angkanya cukup besar," ungkapnya usai rapat paripurna.

Meski hasil monitoring

BPK pada penggunaan anggaran Pemkot Pontianak dinyatakan WTP, namun evaluasi harus dilakukan. Seperti target-target penggunaan anggaran tiap OPD yang tidak tercapai. Tentunya kata Satar ada penyebabnya. Ini yang akan ditanyakan. Ia tidak ingin, anggaran sudah dialokasikan, namun karena keterlambatan SOPD sehingga program tak bisa dilaksanakan.

Terkait pelaksanaan tiap program di masing-masing SOPD memang menjadi perhatian Satar. Ia ingin, program yang bersangkutan dengan masyarakat sebaiknya dapat berjalan sebagaimana mestinya. "Jangan sampai tidak dijalankan," tegasnya

Bamun begitu Satarudin menilai bahwa capaian APBD 2019 sangat baik. "Laporan kepada kepala daerah sudah dilaporkan. Target semua capaian sangat baik, sehingga pada tahun 2019 ini mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK," katanya.

Ia menekankan agar penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) ke depan terus meningkat. "Untuk peningkatan penambahan Aparatur Sipil Negara (ASN) supaya SDM tidak terjadi temuan yang tak diinginkan di setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)," ujarnya. **(oki)**

Silpa
Tutupi
Defisit
Pemkot